

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Kawasan perdesaan merupakan salah satu fokus utama dalam Upaya pemerataan Pembangunan di Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan, pemerintah membutuhkan dukungan dari aktor-aktor lainnya, yakni Masyarakat dan Perusahaan swasta. Adapun peran Perusahaan dalam hal ini diwujudkan melalui *corporate social responsibility* (CSR), yang dimana CSR ini merupakan sebuah komitmen suatu perusahaan atau dunia bisnis dalam memberikan manfaat bagi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, dengan menitikberatkan pada perhatian aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Pranoto & Yusuf, 2014). Di Indonesia, kewajiban dalam pelaksanaan CSR atau PPM (Program Pemberdayaan Masyarakat) diatur dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Bagi Perusahaan, CSR merupakan wujud dari nilai moral bukan karena paksaan ataupun tuntutan. Pengalokasian dana *corporate social responsibility* (CSR) oleh perusahaan untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di area sekitar tambang memberikan pengaruh yang besar.

Pengembangan Masyarakat di wilayah tambang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan setiap warga negara memiliki peran dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas Masyarakat yang terdampak aktivitas tambang. Sebagai bentuk nyata dari Upaya ini, pemerintah Luwu Timur Bersama PT Vale Indonesia mengembangkan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat (PKPM), salah satu programnya adalah program pengembangan Kawasan perdesaan mandiri (PKPM).

Program Pengembangan Kawasan Pedesaan Mandiri (PKPM) berfokus dalam peningkatan kapasitas produksi, penguatan daya saing, dan penciptaan nilai tambah melalui serangkaian program insentif. Program-program ini meliputi pengembangan produk unggulan desa, pelatihan pertanian ramah lingkungan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan infrastruktur sosial dan ekonomi masyarakat. Tujuan utama Program Pengembangan Kawasan Pedesaan Mandiri (PKPM) ialah mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat pasca tambang dan peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan, ramah lingkungan berbasis potensi lokal. Selain itu, PKPM juga menekankan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan mereka sendiri. Dengan model tersebut, pembangunan yang dilakukan diharapkan dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat desa serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang mengedepankan pendekatan partisipatif dan integrasi pembangunan antar desa demi akselerasi peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi juga memastikan bahwa pengambilan keputusan tidak hanya berbasis otoritas pemerintah saja, tetapi melibatkan suara warga sehingga keputusan menjadi lebih demokratis dan sesuai kebutuhan lokal (Asaduzzaman 2020). Dalam praktiknya, *participatory governance* mendorong penyediaan saluran komunikasi terbuka

seperti musyawarah desa, forum konsultasi, dan mekanisme pengawasan sosial, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengontrol dan mengevaluasi pembangunan.

Tata kelola pemerintahan partisipatif atau *participatory governance* merupakan pendekatan strategis yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan. *Participatory governance* secara umum merujuk pada keterlibatan aktif semua pihak terkait, khususnya masyarakat, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan dan program (Anggara, 2012). Partisipasi masyarakat dalam negara demokrasi sangat diperlukan di berbagai aspek kehidupan terutama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pentingnya partisipasi yang pertama adalah dimana partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna perolehan informasi mengenai suatu kebutuhan, sikap, dan kondisi masyarakat setempat dimana dengan tanpa adanya suatu kehadirannya maka program pembangunan serta proyek strategis pembangunan bangsa akan gagal. (Sari & Afyah, 2024)

Tata kelola pemerintahan partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah, Perusahaan swasta, serta masyarakat dalam seluruh proses pembangunan, termasuk dalam kerangka pengambilan keputusan dan pelaksanaan program yang berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, salah satu bentuk nyata pelaksanaan partisipasi oleh perusahaan swasta seperti PT Vale Indonesia Tbk. ialah terwujudnya program pengembangan Kawasan perdesaan mandiri melalui dana CSR Perusahaan. Dalam pelaksanaannya, program pengembangan kawasan perdesaan mandiri (PKPM) di Kabupaten Luwu Timur, mencakup beberapa sektor, cakupannya meliputi pendidikan anak usia dini, layanan kesehatan dasar, pengembangan sentra ekonomi keluarga, praktik pertanian berkelanjutan, dan pengembangan UMKM. Terdapat empat kawasan pengembangan perdesaan di wilayah PT Vale yaitu Kecamatan Nuha, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Towuti, Kecamatan Malili. Kecamatan Nuha sebagai kawasan pengembangan wisata dengan tujuan melestarikan sumber daya alam yang dimiliki, adat-istiadat masyarakat, seni budaya, cagar budaya, dan diharapkan sebagai tren positif peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program PKPM sebagai bentuk dukungan pengembangan wilayah pariwisata yang berbasis kepedulian terhadap keberlangsungan lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya dengan tetap memposisikan masyarakat sebagai perencana, pemilik dan sekaligus pengelola.

Desa Nikkel yang terletak di Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, yang dimana desa ini masuk dalam area operasional penambangan PT Vale. Potensi sumber daya lokal di Desa Nikkel cukup beragam seperti potensi agraris, perikanan, serta keunggulan kawasan wisata alam dan budaya yang mulai dikembangkan sebagai daya tarik wilayah. Kecamatan Nuha, tempat Desa Nikkel berada, memiliki beberapa objek wisata alam unggulan seperti Danau Matano, air terjun, dan kawasan konservasi yang dapat mendukung ekonomi berbasis pariwisata. Selain itu, sektor pertanian tradisional seperti perkebunan lada, kelapa sawit, dan kakao juga menjadi sumber penghidupan penting bagi masyarakat desa yang tidak terlibat langsung dalam sektor tambang.

Kemudian dalam konteks implementasi program PKPM, Desa Nikkel menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memadukan kebutuhan pembangunan ekonomi yang cepat dengan upaya pelestarian lingkungan dan kearifan lokal yang rentan tergerus akibat aktivitas industri tambang. Selain itu, keterbatasan kapasitas kelembagaan masyarakat desa dalam

mengelola program pembangunan juga menjadi hambatan, terutama dalam mengoptimalkan partisipasi warga secara aktif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) di Desa Nikkel merupakan upaya strategis yang melibatkan partisipasi antara PT Vale Indonesia, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaan PKPM tidak luput dari berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan hasil dari program tersebut. Meskipun PT Vale telah mengalokasikan dana CSR sebesar \$6.381.165 yang meliputi 3 wilayah pertambangan PT Vale yaitu Sorowako, Pomala dan Bahodopi. Akan tetapi, realita yang terjadi di lapangan terkhususnya di Desa Nikkel menunjukkan bahwa pembangunan fisik seperti Lapangan Benteng justru mengalami pengurangan dari segi fasilitas yang ada sehingga menyebabkan kekecewaan warga. Hal ini juga di sebabkan oleh kurangnya pemberdayaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yakni pada lapangan benteng. Permasalahan pemberdayaan yakni kurangnya partisipasi masyarakat secara optimal dalam tahapan pelaksanaan program. Hal ini disebabkan oleh kendala seperti keterbatasan pemahaman tentang program, kurang aktifnya organisasi masyarakat, serta motivasi berkontribusi yang kurang merata. sehingga menyebabkan kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan sumber daya, baik dari segi finansial maupun sumber daya alam yang belum berjalan secara akuntabel. Hal ini menyebabkan masalah pemborosan dan pemanfaatan sumber daya yang tidak maksimal serta mengancam kelestarian lingkungan hidup di kawasan tambang nikel (Nabila, 2022).

Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya masalah yang menarik untuk diteliti. Meskipun dana bantuan (CSR) yang dialokasikan sangat besar, pembangunan fasilitas umum seperti Lapangan Benteng justru terbengkalai dan membuat warga kecewa. Hal ini menunjukkan adanya 'mata rantai yang putus' dalam komunikasi antara perusahaan, pemerintah, dan warga desa. Dengan meneliti Desa Nikkel, kita bisa melihat lebih jelas mengapa partisipasi warga masih rendah dan bagaimana seharusnya warga dilibatkan agar pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, bukan hanya sekedar formalitas program saja.

Pemilihan Desa Nikkel sebagai lokasi penelitian sangat penting karena desa ini berada langsung di tengah-tengah wilayah tambang PT Vale Indonesia. Desa ini memiliki keunikan tersendiri. meskipun masyarakatnya hidup berdampingan dengan industri tambang yang besar, mereka juga punya potensi wisata alam seperti Danau Matano dan sektor pertanian yang sebenarnya bisa membuat desa mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada tambang.

Participatory governance memiliki peran krusial terhadap program PKPM, karena ketika keterlibatan masyarakat dan seluruh *stackholder* rendah, maka program menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal yang mengakibatkan hasilnya kurang optimal. Koordinasi yang tidak efektif menyebabkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan menghambat pencapaian target program. Sementara itu, pengelolaan sumber daya yang tidak maksimal menimbulkan kerentanan pada keberlanjutan pembangunan, mengancam ekosistem daerah, dan mengurangi potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya memperbaiki partisipasi masyarakat, memperkuat koordinasi antar

pemangku kepentingan, serta meningkatkan tata kelola sumber daya merupakan titik kunci dalam meningkatkan efektivitas dan hasil PKPM di Desa Nikkel.

Sinergi strategis PT Vale, pemerintah daerah, dan komunitas lokal berpotensi mengembangkan kawasan perdesaan yang mandiri melalui integrasi tiga potensi unggulan: mineral, agribisnis, dan pariwisata. Penerapan tata kelola partisipatif (*participatory governance*) dalam program ini diharapkan dapat memperkuat partisipasi masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan yang berorientasi pada Peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan serta lingkungannya.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dikemukakan, maka peneliti akan menganalisis *Participatory Governance* dalam program PKPM di Desa Nikkel. Dengan rumusan masalah “bagaimana *Participatory Governance* dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) di Desa Nikkel, Kabupaten Luwu Timur?”.

1.2. Tinjauan Teori

1.2.1. *Participatory Governance*

Participatory Governance atau tata kelola partisipatif merupakan model penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai syarat utama. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan publik merupakan wujud nyata dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Partisipasi merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kebijakan publik tidak akan terlaksana secara efektif jika tidak ada partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat digambarkan sebagai keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan melaksanakan kehidupannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Partisipasi ini merupakan salah satu faktor penting demi terciptanya good governance dalam suatu negara (Sari & Afiyah, 2024).

Participatory governance sebagai suatu proses di mana warga negara secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Dengan adanya *participatory governance* menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perumusan kebijakan, dari perencanaan hingga evaluasi, untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar mewakili kepentingan publik (Nugroho, 2015)

Participatory governance adalah sebuah sistem di mana warga negara tidak hanya memiliki akses yang lebih besar terhadap proses pengambilan keputusan, tetapi juga aktif terlibat dalam merancang, mengevaluasi, dan mengawasi implementasi kebijakan publik. Prinsip ini tidak hanya menguatkan legitimasi pemerintahan dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan keragaman kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan memungkinkan partisipasi yang inklusif, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih berdasarkan pada informasi yang akurat, pengalaman langsung dari masyarakat, dan solusi yang lebih tepat bagi tantangan-tantangan lokal maupun nasional. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, memperkuat kapasitas institusi publik, dan membangun hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan warganya (Prasojo, 2012).

Sejak pertama kali memperkenalkan istilah *participatory governance* dalam tulisannya "*Thinking About Empowered Participatory Governance*" Fung and Wright (2003) berpendapat bahwa penguatan partisipasi adalah strategi reformasi institusional progresif yang akan memperkuat praktik demokrasi secara konsep maupun empiris. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa *empowered participatory governance* bertumpu pada nilai demokrasi, musyawarah dan pemberdayaan (Fung & Wright, 2003)

Dalam tulisannya, Fung dan Wright (2003) mengeksplorasi tiga prinsip dari *empowered participatory governance* yakni:

1. *Practical Orientation*

Pada prinsip ini, hal yang digarisbawahi adalah aktor-aktor yang terlibat perlu mengembangkan struktur tata kelola yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang konkrit. Fokus praktis ini juga menciptakan situasi di mana aktor-aktor yang terbiasa bersaing dengan satu sama lain untuk kekuasaan atau sumber daya dapat mulai membangun hubungan kerja sama atau berkolaborasi.

2. *Bottom-up Participation*

Prinsip ini menekankan bagaimana menciptakan ruang bagi masyarakat atau warga negara yang paling terkena dampak dari permasalahan yang hendak diselesaikan. Hal ini akan lebih memperpendek jarak antar pemerintah dan kelompok sasaran. Dengan orientasi *bottom-up* akan lebih membuka penyelesaian masalah dengan keterlibatan semua pemangku kepentingan untuk berkoordinasi dan melakukan pertukaran sumber daya.

3. *Deliberative Solution Generation*

Deliberation (musyawarah) adalah salah satu ciri khas utama dalam pendekatan *participatory governance*. Dalam hal ini, pengambilan keputusan melalui musyawarah yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan harus mampu saling meyakinkan satu sama lain. Arena tersebut akan menjadi dialog yang diskurtif terutama dalam mempertemukan kepentingan-kepentingan yang berbeda dan mencapai keputusan yang kolektif. Pengambilan keputusan partisipatif dapat dilakukan dengan tiga metode pilihan sosial yaitu *command and control by experts*, *aggregative voting*, dan *strategic negotiating*.

Selain tiga prinsip yang telah diutarakan sebelumnya, Fung dan Wright (2003) juga menawarkan tiga desain kelembagaan sebagai upaya dalam memperdalam nilai demokrasi dan partisipasi. Ketiganya didesain agar prinsip-prinsip *participatory governance* yang berdaya dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan lingkungan kelompok sasaran dari kebijakan.

Adapun tiga desain kelembagaan dalam *empowered participatory governance* menurut Fung dan Wright (2003) diantaranya pertama, devolusi (*devolution*), yaitu penyerahan kewenangan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kepada unit-unit lokal, kedua *centralized supervision and coordination*, yaitu adanya supervisi terpusat dan desentralisasi yang terkoordinasi (*coordinated decentralization*), dimana unit-unit lokal tersebut tidak bersifat otonom melainkan tergabung dan terhubung satu sama lain, unit tersebut dibawah pengawasan pemerintah yang bertindak untuk memperkuat kualitas musyawarah demokrasi lokal dan pemecahan masalah dalam berbagai cara,

mengoordinasi dan mendistribusikan sumber daya, memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh unit lokal, memperbaiki keputusan patologis atau yang tidak kompeten dalam kelompok yang gagal, dan mengembangkan mekanisme inovasi dan pembelajaran; ketiga, peran negara yang besar (*statecentered*) dan tidak didasarkan kesukarelaan (*voluntarisme*) belaka. Dalam hal ini, institusi-institusi negara coba ditransformasi menjadi unit-unit *deliberatif*. Reformasi *empowered participatory governance* pada jalur formal tersebut berpotensi dapat memanfaatkan kekuasaan dan sumberdaya negara menjadi lebih sesuai dengan nilai-nilai *deliberasi* dan partisipasi warga (*popular participation*) sehingga memungkinkan praktik tersebut menjadi lebih mampu bertahan lama dan dapat berlaku luas.

Setelah menetapkan prinsip dan menawarkan desain kelembagaan dalam *empowered participatory governance*, selanjutnya Fung dan Wright (2003) mengintegrasikan pada satu simpul model *empowered participatory governance* yang dijabarkan dalam 6 (enam) dimensi:

1. *Deliberation* (Musyawarah)

Dimensi ini terkait posisi keputusan atau kebijakan yang diambil. Apakah telah dibahas melalui musyawarah untuk mendapatkan keputusan atau kebijakan yang kolektif, serta bagaimana antar aktor dan pemangku kepentingan yang terlibat telah saling beradaptasi dalam diskusi atau musyawarah tersebut.

2. *Action* (Aksi)

Dimensi ini menekankan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menindaklanjuti keputusan hasil musyawarah yang telah disepakati. Apakah telah diimplementasikan melalui aksi nyata.

3. *Monitoring* (Pemantauan)

Dimensi ini menekankan bagaimana sebuah keputusan bukan hanya menjadi sebuah tindakan, tetapi juga menuntut adanya mekanisme pemantauan. Sejauh mana masyarakat dapat memantau pelaksanaan keputusan mereka dan menuntut pertanggung jawaban dari pihak terkait.

4. *Centralized Coordination and Power* (Koordinasi dan Kekuasaan Terpusat)

Dalam model pemerintahan partisipatif yang berdaya, unit lokal tidak bertindak secara mandiri. Sebaliknya, mereka belajar dan mengkoordinasikan tindakan mereka dengan unit lokal lainnya dan sesuai dengan struktur.

5. *School of Democracy* (Pembelajaran Demokrasi)

Dimensi ini melibatkan individu yang memiliki sedikit pengalaman dan keterampilan dalam berpartisipasi. Dimensi ini menekankan tentang bagaimana proses kebijakan dalam mampu meningkatkan kapasitas individu atau kelompok yang terlibat dalam musyawarah, sehingga berfungsi sebagai sekolah demokrasi

6. *Outcomes* (Hasil)

Dimensi ini menjelaskan bahwa bagi banyak orang, hal yang paling penting dari sebuah program bukanlah teorinya, melainkan hasilnya yang lebih baik daripada program sebelumnya. Dalam suatu program yang dijalankan dengan memberikan kekuasaan kepada masyarakat lokal untuk bermusyawarah, apakah benar-benar menghasilkan solusi yang lebih efektif dibandingkan jika keputusan hanya dibuat oleh pemerintah.

Teori yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah teori *Participatory Governance* oleh Fung dan Wright (2003). penggunaan teori ini dikarenakan peneliti merasa teori ini merupakan teori yang relevan terhadap masalah yang penulis teliti. Teori ini menekankan pada penguatan partisipasi masyarakat sebagai strategi reformasi institusional yang progresif, dengan fokus pada nilai demokrasi, musyawarah, dan pemberdayaan. Dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM), teori ini mengarahkan pada keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan yang berdaya, bukan hanya objek, sehingga mereka dapat secara langsung berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program untuk mencapai pembangunan perdesaan yang mandiri dan berkelanjutan melalui proses musyawarah dan kontrol kolektif.

1.2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian berjudul *Participatory Governance* dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) di Desa Nikkel, Kabupaten Luwu Timur berfokus pada analisis praktik tata kelola partisipatif yang melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta, khususnya PT Vale Indonesia, dalam kerangka pembangunan pascatambang yang berlandaskan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dengan menggunakan teori *Empowered Participatory Governance* yang dikemukakan oleh Fung dan Wright (2003), penelitian ini mengidentifikasi enam dimensi utama partisipasi kolaboratif, yakni musyawarah, aksi, mekanisme pengawasan, koordinasi terpusat, pembelajaran demokratis, serta hasil kebijakan. Pendekatan tersebut memberikan kebaruan teoretis karena tidak hanya membahas tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga memosisikan partisipasi sebagai proses kolaboratif antaraktor yang berorientasi pada keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologis di kawasan perdesaan pasca tambang.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2022) dengan judul "Participatory Governance Dalam Proses Perumusan Kebijakan Pembangunan Di Desa Sunggal Kanan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang", fokus kajiannya terpusat pada penerapan *Participatory governance* dalam proses perumusan kebijakan pembangunan desa di Sunggal Kanan, Kabupaten Deli Serdang. Studi tersebut menyoroti dimensi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan variabel sosial seperti status, pendidikan, dan tingkat kesibukan warga. Dengan demikian, orientasi penelitian Harahap lebih menekankan pada dinamika politik pemerintahan desa, sedangkan penelitian di Desa Nikkel menyoroti implementasi kolaborasi lintas-aktor dalam pelaksanaan program pembangunan terpadu.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Yanty, dkk (2021) dengan judul penelitian "Participatory Governance dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kelurahan Manggala Kota Makassar" penelitian ini melihat bagaimana penerapan *participatory governance* dalam kegiatan pemberdayaan kelompok tani di Kelurahan Manggala, Kota

Makassar. Fokus penelitian tersebut berkaitan dengan efektivitas kegiatan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan kunjungan lapangan yang difasilitasi oleh pemerintah guna meningkatkan kapasitas petani. Penelitian tersebut berorientasi sektoral dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat agraris perkotaan, berbeda dengan penelitian di Desa Nikkel yang mengedepankan penguatan kapasitas kelembagaan lokal serta kolaborasi multi-pemangku kepentingan dalam konteks pembangunan perdesaan pasca tambang.

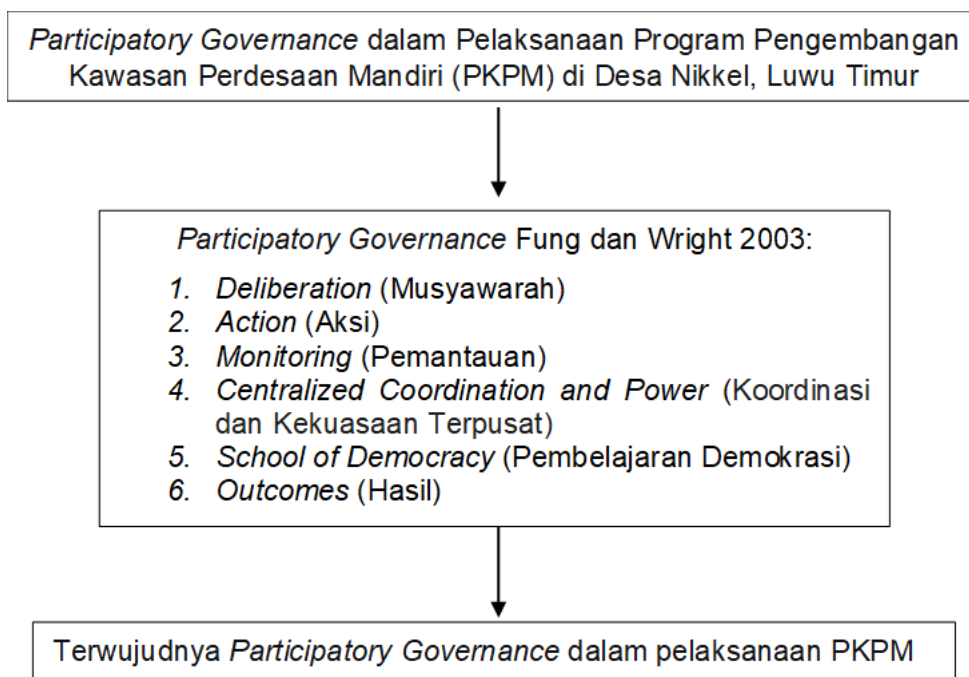
Penelitian yang dilakukan oleh Hamdan (2025) dengan judul “Tata Kelola Partisipatif Pada Agrowisata Di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto” membahas terkait *participatory governance* dalam pengembangan agrowisata di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, menyoroti keterlibatan masyarakat, pemerintah desa, dan kelompok sadar wisata dalam mengelola potensi agrowisata berbasis sumber daya lokal. Walaupun sama-sama menekankan kolaborasi antar aktor dalam pembangunan berbasis potensi daerah, penelitian ini lebih diarahkan pada pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata komunitas, sedangkan penelitian di Desa Nikkel berfokus pada revitalisasi sosial-ekonomi masyarakat melalui sinergi program CSR dalam konteks pasca tambang.

Penelitian yang dilakukan oleh Hendryansah (2024) dengan judul “Partisipasi Publik Dalam Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri Desa Wisata Baruga Collaboration Centre Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu timur”, dimana hasil penelitian tersebut tingkat partisipasi masyarakat dan efektivitas pelaksanaan program yang diprakarsai oleh perusahaan. Penelitian tersebut belum secara komprehensif menguraikan mekanisme tata kelola partisipatif lintas aktor sebagaimana dijabarkan dalam penelitian di Desa Nikkel. Oleh karena itu, penelitian di Desa Nikkel memiliki keunggulan konseptual karena mampu mengintegrasikan perspektif kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam satu kerangka teoretis yang menyatukan prinsip pemberdayaan dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Secara umum, perbedaan mendasar antara penelitian di Desa Nikkel dan studi-studi terdahulu terletak pada aspek lokus, fokus kajian, serta tingkat analisis yang digunakan. Penelitian ini tidak hanya menguraikan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, tetapi juga menganalisis relasi antar aktor, proses pengambilan keputusan, serta dampak kelembagaan terhadap efektivitas pembangunan berkelanjutan di wilayah pasca tambang. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual yang signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik *participatory governance* di tingkat lokal, khususnya dalam membangun model tata kelola pembangunan perdesaan yang bersifat kolaboratif, transparan, dan inklusif.

1.2.3. Kerangka berpikir

Terdapat kerangka berpikir pengkajian ini bisa diamati pada gambar berupa:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu menganalisis sejauh mana *Participatory Governance* dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) di Desa Nikkel, Luwu Timur.

1.3.2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

1. Menambah wawasan dan pengembangan ilmu pemerintahan di bidang tata kelola partisipatif, khususnya dalam konteks pembangunan kawasan perdesaan mandiri.
2. Memperkaya kerangka konsep terkait hubungan antara partisipasi masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan keberhasilan program pembangunan berbasis masyarakat.
3. Memberikan dasar teoritis yang dapat mendukung pembentukan kebijakan dan melaksanakan program pembangunan perdesaan yang lebih efektif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
4. Memperkuat pemahaman tentang mekanisme keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan program pembangunan, termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

b. Secara Praktis

1. Bagi peneliti

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengalaman langsung dalam pengumpulan dan analisis data terkait *Participatory Governance* dan meningkatkan pengetahuan tentang partisipasi Masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta dalam konteks dunia nyata.

2. Bagi Kantor Desa Nikkel dan PT Vale Indonesia

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memperkuat hubungan sosial dan kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk pembangunan berkelanjutan serta menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan.

3. Bagi Penulis Selanjutnya

Melalui penelitian ini, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman berharga dalam penulisan karya ilmiah dan pelaksanaan penelitian, sehingga memperkaya wawasan dan pengetahuannya.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami Participatory Governance dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) di Desa Nikkel, Luwu Timur. Pemilihan pendekatan kualitatif didasari oleh tujuan penelitian untuk memahami secara mendalam realitas sosial yang kompleks, dalam hal ini terkait dengan Participatory Governance dalam Pelaksanaan Program PKPM di Desa Nikkel. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih detail. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang diberikan individu maupun kelompok terhadap persoalan sosial tertentu.

2.2. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Yin (2014), studi kasus didefinisikan sebagai suatu penelitian empiris yang mengeksplorasi fenomena dalam konteks di mana batas-batas antara fenomena dan lingkungan yang terlihat secara tegas. Yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan. Studi kasus dipilih sebagai metode penelitian karena memungkinkan untuk mengeksplor secara detail dan kontekstual berbagai aspek partisipasi tersebut.

2.3. Prosedur Penelitian

2.3.1. Penentuan Informan

Dalam penelitian ini penentuan informan menggunakan teknik *snowball*, dimana teknik ini melibatkan *key-informant* untuk menghasilkan informan lainnya, sehingga sampel terus bertambah berdasarkan saran atau rekomendasi dari informan sebelumnya, sehingga sampel berkembang secara bertahap seperti bola salju yang menggelinding dan makin membesar. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 2.3.1.1 Informan Penelitian

Pemerintah Desa	Masyarakat	Swasta
2 Orang (Kepala Desa dan Sekretaris Desa)	3 Orang Masyarakat Lokal	1 Orang (<i>External Relation Officer</i> PT Vale Indonesia)
1 Orang (KetuaBUMDes Nikkel)		6 Orang (Tim Commit)

Sumber : Olahan Peneliti, 2026

2.3.2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati aktivitas dan perilaku komunikasi yang sedang berlangsung, Creswell (2013). Observasi ini berperan dalam merumuskan dan membandingkan permasalahan

yang ada serta membantu dalam mengembangkan pertanyaan penelitian yang selanjutnya digunakan dalam pengembangan kuesioner. Lebih lanjut, observasi juga berfungsi untuk menentukan strategi pengumpulan data yang paling tepat dan memilih metode pemahaman yang paling tepat. Selama observasi, peneliti mencatat segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan dirasakan, karena fokus observasi adalah mencatat fakta, bukan pendapat pribadi. Sebelum melakukan observasi, peneliti biasanya menyiapkan daftar pertanyaan berdasarkan informasi yang dikumpulkan, menetapkan tujuan observasi, dan memperkirakan jangka waktu pelaksanaan. Proses observasi meliputi pencatatan data primer dan sekunder dan dilakukan secara langsung di Desa Nikkel, Luwu Timur dengan menemui informan yang tepat dan relevan.

b. Wawancara

Menurut Creswell (2013), wawancara merupakan serangkaian prosedur penting yang berfungsi untuk memverifikasi validitas, reliabilitas, dan generalisasi hasil penelitian agar dapat dihimpun dan dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. Proses wawancara berlangsung secara bertahap dengan bantuan panduan berisi pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan untuk diajukan kepada informan terkait.

Wawancara dilakukan secara langsung dengan interaksi tatap muka antara pewawancara dan informan. Namun, proses wawancara tetap berada dalam fokus penelitian yang telah ditentukan yaitu, peneliti ingin mengetahui bentuk partisipasi antara pemerintah, pihak swasta, serta masyarakat dalam program pengembangan kawasan perdesaan mandiri di Desa Wisata Nikkel. Melalui wawancara, peneliti memperoleh informasi dan pengalaman yang relevan dari narasumber yang terkait dengan objek penelitian. Metode ini diharapkan dapat membantu peneliti mengumpulkan data yang komprehensif dan akurat terkait partisipasi yang diteliti.

c. Studi dokumentasi

Untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dan informasi, selain itu sebagai bukti tambahan untuk semakin memperkuat keyakinan pembaca terhadap temuan penelitian. Dengan dukungan dokumentasi yang relevan akan memperkuat keabsahan penelitian terkait *Participatory Governance*.

2.3.3. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi disusun secara sistematis dengan tujuan mengorganisasikan informasi ke dalam kategori-kategori tertentu. Proses analisis data terdiri dari beberapa fase utama: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan informasi yang diperlukan sesuai dengan pedoman yang telah disusun sebelumnya. Data yang diperoleh berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian.

b. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses meringkas dan menyederhanakan data yang terkumpul agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Pada tahap ini, peneliti menyaring, meringkas, dan mengolah data mentah seperti catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumen menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan jelas. Proses ini bertujuan untuk memberikan peneliti gambaran yang lebih jelas mengenai data yang telah dikumpulkan.

c. Penyajian Data

Data yang telah disederhanakan kemudian dikelompokkan dan digabungkan. Tujuan penyajian data yaitu untuk membantu kita memahami data dan mengambil kesimpulan yang mendalam.

d. Kesimpulan

Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan jawaban para informan yang mencerminkan fenomena yang terjadi di lapangan selama proses penelitian. Kesimpulan yang diambil berujuan untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

2.3.4. Validitas dan Reliabilitas

a. Validitas

Dalam penelitian, instrumen pengukuran yang akurat dan reliabel, yang dikenal sebagai validitas, diperlukan. Validitas ini berfungsi sebagai alat untuk memastikan kebenaran dalam proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif, validitas data mengacu pada sejauh mana data yang diperoleh dari objek penelitian konsisten dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Penelitian ini menerapkan metode validasi yang menggunakan teknik triangulasi. Menurut Husnullail dan Jailani (2024) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan akurat tentang fenomena yang diteliti. Dengan teknik ini, peneliti dapat mengurangi kemungkinan bias sekaligus meningkatkan kredibilitas penelitian. Hal ini karena data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan meliputi:

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan strategi yang dilakukan dengan memeriksa keaslian data melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas data yang terkumpul. Dengan demikian, peneliti dapat mengurangi bias dan memastikan hasil penelitian yang lebih akurat dan objektif.

2) Triangulasi Metode

Untuk memperkuat validitas data, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Kombinasi metode ini menghasilkan hasil yang lebih akurat.

b. Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memastikan keandalan dan konsistensi hasil penelitian. Reliabilitas ini mencakup prosedur yang diterapkan peneliti untuk mencapai hasil penelitian, yang harus dibuktikan melalui beberapa tahap: identifikasi masalah, pengumpulan data lapangan, pemilihan sumber data, analisis data, uji keabsahan, dan akhirnya penarikan kesimpulan.